

EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI TEORI WILLIAM DUNN (STUDI KASUS PADA SDN LIDAH KULON I/464 SURABAYA)

Lu Luatul Azizah

Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

lu.21086@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Dana BOS merupakan bantuan Pendidikan pemerintah untuk meniadakan pungutan biaya Pendidikan di sekolah khususnya di sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk itu, perlu adanya evaluasi atas pengelolaan dana BOS di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dana BOS di SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya telah terkelola dengan baik sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn karena sekolah memenuhi kriteria efektivitas dengan mencapai tujuan pembebasan pungutan biaya sekolah. Kemudian pada kriteria efisiensi dilaksanakan dengan melakukan pembelanjaan kebutuhan sekolah sesuai dengan Standar Harga Pembelian (SSH) yang mana kebutuhan sekolah dibeli dengan harga terendah. Selanjutnya, kecukupan di SDN Lidah Kulon I Surabaya terealisasi dengan cara menggunakan seluruh anggaran dana BOS untuk memenuhi kebutuhan siswa dari segi sarana prasarana hingga kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Pada kriteria perataan, sekolah memberikan kesempatan seluruh siswa untuk menikmati fasilitas sekolah secara adil. Selanjutnya, kriteria responsivitas direalisasikan dengan memberikan sosialisasi pada PTK dan kesempatan revisi RKAS sebanyak lima kali dalam setahun. Dan yang terakhir, adanya pelaporan secara online melalui ARKAS, pengawasan dari pengawas sekolah dan Dinas Kota Surabaya, serta pembelanjaan melalui aplikasi SipLah dapat memenuhi kriteria ketepatan.

Keywords:

anggaran; bantuan operasional sekolah; evaluasi; kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi suatu bangsa untuk bisa menjadi negara yang maju dan adidaya. Pendidikan yang baik akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia suatu bangsa di kancah global. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pendidikan di negaranya. Pemerintah Indonesia pun turut mendukung pertumbuhan Pendidikan di Indonesia salah satunya melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini telah beralih nama menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pengelolaan dana BOS juga tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Kebijakan pengelolaan dana BOS telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

Dana BOS merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan satuan Pendidikan di tingkat SD/SDLB negeri, SMP/SMPLB negeri, dan SMA/SMK negeri agar tidak terjadi pungutan biaya Pendidikan di sekolah. Dana BOS menyediakan pendanaan biaya operasional non-personalia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya nonpersonalia mencakup biaya bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai serta biaya langsung mencakup daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, asuransi, pajak, uang lembur, dan sebagainya.

Di tahun 2022, Pemerintah Indonesia menyalurkan dana BOS sebesar 51,6 triliun rupiah untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat. Di tahun 2023, anggaran dana BOS naik hingga mencapai 59,08 triliun rupiah untuk 216.662 sekolah. Dana tersebut disalurkan melalui beberapa macam dana BOS mulai dari Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Di tahun sebelumnya, besaran dana BOS untuk setiap siswa sama rata yaitu 900.000 Rupiah tetapi di tahun 2021 besaran dana BOS menjadi bervariasi mulai dari 900.000 Rupiah hingga 1,9 juta setiap siswa.

Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS ini masih terjadi kendala maupun penyelewengan. Maka sangat perlu diadakan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan dana BOS di sekolah untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan sehingga merugikan pemerintah, sekolah, maupun siswa mengingat anggaran dana BOS yang terbilang besar.

Evaluasi berkaitan dengan penilaian dan analisis terhadap nilai atau manfaat yang terkait dengan hasil kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sebuah program atau kebijakan telah berjalan dan apakah berhasil atau gagal sesuai harapan. Evaluasi juga melibatkan pengumpulan fakta terkait kebijakan serta pembuktian nilai fakta tersebut jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan (Stufflebeam, 1985).

Menurut Jones, evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dirancang untuk menilai hasil-hasil dari program pemerintah dengan menggunakan teknik pengukuran, metode analisis, dan objek yang relevan. Hal ini berarti evaluasi kebijakan melibatkan proses pencarian, penggambaran, dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk menentukan alternatif keputusan (Jones, 1985). Anderson mendefinisikan evaluasi sebagai proses yang menentukan hasil yang telah dicapai dalam merencanakan untuk mendukung tercapainya sebuah tujuan (Agustino, 2016). Dalam hal ini, evaluasi digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam konteks kebijakan. Sedangkan menurut William N. Dunn, istilah "evaluasi" memiliki beberapa arti yang berhubungan dalam konteks kebijakan dan program. Istilah-istilah tersebut meliputi (Rina et al., 2018):

1. Penaksiran (appraisal): Merujuk pada proses penilaian yang menyeluruh terhadap kebijakan atau program untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan efisiensinya. Penaksiran melibatkan analisis menyeluruh terhadap tujuan, implementasi, dan hasil dari kebijakan atau program tersebut (Akibu, 2014).

2. Pemberian angka (rating): Merupakan proses penilaian yang menggunakan skala numerik atau kategori tertentu untuk memberikan penilaian terhadap kinerja, kualitas, atau efektivitas kebijakan atau program. Pemberian angka dapat membantu dalam mengukur dan membandingkan prestasi atau hasil kebijakan dengan standar atau indikator yang telah ditetapkan (Akbar, 2016).

3. Penilaian (assessment): Merujuk pada proses evaluasi yang lebih umum, mencakup analisis menyeluruh terhadap kebijakan atau program dengan menggunakan berbagai metode dan alat evaluasi. Penilaian melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program tersebut (Hasbullah & Anam, 2019).

Dalam konteks ini, istilah-istilah tersebut digunakan secara serupa dengan istilah "evaluasi" dan mengacu pada aplikasi skala nilai yang berbeda-beda terhadap hasil kebijakan dan program (Setiawan et al., 2017). Masing-masing istilah tersebut dapat digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan evaluasi yang spesifik. Dengan demikian, evaluasi kebijakan melibatkan analisis nilai-nilai yang terkait dengan kebijakan, pengukuran hasil, perbandingan dengan standar, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh evaluasi tersebut. William Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, Antara lain (William N. Dunn, 2003):

1) Efektivitas (*effectiveness*): Mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan atau alternatif dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efektivitas berfokus pada keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, baik dalam bentuk produk atau layanan yang dihasilkan maupun dalam nilai moneter.

2) Efisiensi (*efficiency*): Menilai jumlah upaya atau usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, khususnya dalam hal biaya moneter. Rasionalitas ekonomi menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi efisiensi kebijakan.

3) Kecukupan (*adequacy*): Menyelidiki sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan memenuhi kebutuhan, nilai, atau potensi munculnya masalah. Kriteria kecukupan menyoroti keterkaitan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut cukup dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4) Perataan (*equity*): Membahas tentang distribusi dampak dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria perataan berkaitan erat dengan pertimbangan hukum dan sosial, dan menekankan pada adilnya distribusi hasil (misalnya, pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter). Pada dasarnya, kebijakan yang berorientasi pada perataan berupaya mendistribusikan dampak kebijakan secara adil di antara kelompok-kelompok masyarakat.

5) Responsivitas (*responsiveness*): Menilai sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena sebuah kebijakan, meskipun memenuhi kriteria lain seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, masih dianggap gagal jika tidak responsif terhadap kebutuhan aktual kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.

6) Ketepatan (*appropriateness*): Kriteria ini terkait erat dengan rasionalitas substantif dan berfokus pada nilai atau harga dari tujuan program. Ketepatan menyoroti nilai-nilai yang mendasari tujuan-tujuan program dan pentingnya asumsi yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut sesuai dan relevan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Soulisa, 2017).

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn (2003). Pengantar Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi yang dilakukan di SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya terkait pengelolaan dana BOS sesuai dengan kriteria yang telah dikembangkan oleh William Dunn melalui enam kriteria yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan teori sebagai panduan dalam mengembangkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian. Namun, penggunaan teori dalam penelitian kualitatif tidak bersifat menguji hipotesis atau generalisasi, melainkan lebih pada pengembangan pemahaman tentang

fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan yakni bendahara dari SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya, dan mencoba untuk memahami pengalaman dan perspektif mereka. Oleh karena itu, hasil dari penelitian kualitatif memerlukan kedalaman analisis dan interpretasi dari peneliti untuk mengungkapkan makna di balik data yang dikumpulkan (Ramdhan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Penilaian terhadap efektivitas kebijakan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini melibatkan evaluasi apakah hasil yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan ketepatan waktu pencapaian tujuan tersebut. Dalam evaluasi efektivitas, penting untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai sasaran dengan mempertimbangkan apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jika hasil kebijakan mendekati atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka itu menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Namun, jika hasilnya jauh dari sasaran yang ditetapkan, maka efektivitasnya rendah. Dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan, dapat diidentifikasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan atau rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

Dalam hal evaluasi efektivitas kebijakan dana BOS maka yang harus diperhatikan adalah tujuan dari adanya dana BOS ini terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai. Tujuan ini kemudian menjadi indikator ketercapaian efektivitas kebijakan. Tujuan utama dari adanya dana BOS adalah pembebasan biaya pungutan bagi seluruh siswa sehingga setiap anak-anak usia sekolah dasar dapat tetap bersekolah. Dalam pelaksanaannya, di SDN Lidah Wetan IV Surabaya dapat diketahui bahwa sekolah tidak menerapkan biaya pungutan kepada para siswanya. Dilansir dari keterangan narasumber yaitu bendahara sekolah, dana BOS seluruhnya dianggarkan kepada kebutuhan peserta didik, tidak termasuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Dana BOS yang dianggarkan oleh pemerintah untuk SDN Lidah Kulon I Surabaya juga dapat dikatakan cukup untuk mengelola sekolah selama satu tahun. Apabila terdapat pengeluaran tak terduga, maka yang dilakukan sekolah adalah dengan menggunakan dana yang berasal dari kegiatan kewirausahaan sekolah yakni koperasi sekolah dan entrepreneur day. Dengan demikian, siswa tidak perlu membayar biaya pungutan Pendidikan. dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya sudah memenuhi indikator efektivitas karena mampu mengelola semua biaya Pendidikan di sekolah tersebut dengan baik agar tidak memungut biaya dari siswanya.

Efisiensi

William Dunn menyatakan bahwa efisiensi terkait dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Dalam pandangan Dunn,

efisiensi sering dianggap sebagai sinonim dari rasionalitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi melibatkan hubungan antara tingkat efektivitas yang dicapai dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan. Dalam banyak kasus, efisiensi diukur dalam satuan ongkos moneter. Untuk menilai efisiensi suatu kebijakan, perhitungan biaya per unit produk atau layanan sering digunakan. Dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut efisien. Kebijakan yang mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan biaya yang paling rendah dianggap efisien. Dalam hal ini, efisiensi mencerminkan upaya untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif. Dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, kebijakan dapat dievaluasi dalam konteks ekonomi dan sumber daya yang digunakan.

Dalam aspek efisiensi penggunaan dana BOS ini maka yang menjadi indikator adalah jumlah biaya yang dianggarkan untuk setiap kebutuhan sekolah. Dalam menganggarkan kebutuhan sekolah maka sekolah merancang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam RKAS tersebut akan dirinci kebutuhan sekolah, bahkan hingga polpen pun masuk ke dalam anggaran. Dalam menganggarkan RKAS tersebut juga biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan Standar Harga Pembelian (SSH) yang ada dalam petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah. Biaya tersebut juga merupakan harga terendah dari suatu produk. Misalnya merek A dijual seharga Rp15.000, merek B dijual seharga Rp17.000, dan merek C dijual seharga Rp13.000 maka harga yang ditentukan adalah harga jual merek C. biaya yang dianggarkan dalam RKAS juga tidak boleh melebihi anggaran sesuai juknis. Hal ini dilakukan agar anggaran semua kebutuhan dapat tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya sudah memenuhi kriteria efisiensi karena menggunakan biaya terendah untuk memperoleh kebutuhan sekolah.

Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) dalam konteks kebijakan menunjukkan sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang muncul. William N. Dunn menyatakan bahwa kecukupan terkait dengan tingkat kepuasan yang tercapai dalam hal mencukupi atau memadai. Dalam pandangan Dunn, kecukupan berkaitan erat dengan efektivitas, namun lebih menekankan pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang muncul seiring dengan masalah atau tantangan yang ada. Dengan kata lain, kecukupan berfokus pada keterhubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dalam evaluasi kebijakan, penting untuk mengevaluasi kecukupan kebijakan dengan mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang relevan. Apakah kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang ada secara memadai, apakah nilai-nilai yang dijunjung tinggi terpenuhi, dan apakah memberikan kesempatan yang memadai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan memperhatikan kecukupan dalam evaluasi kebijakan, pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam memenuhi kebutuhan dan nilai yang relevan. Jika kebijakan

mencapai tingkat kecukupan yang memadai, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai-nilai yang diharapkan.

Dalam kriteria ini, maka hal yang menjadi indikator ketercapaian adalah ketersediaan alokasi dana untuk kebutuhan operasional. Anggaran dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya berhasil digunakan untuk merealisasikan berbagai kebutuhan dan kegiatan sekolah. Sarana dan prasarana yang belum ada di sekolah kini telah tersedia di sekolah, sarana prasarana yang kurang layak juga dapat diperbaiki dengan dana BOS, kegiatan internal maupun eksternal peserta didik mulai dari lomba, classmeet, maupun kegiatan lainnya dapat terlaksana. Dengan demikian, kriteria kecukupan dalam evaluasi kebijakan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya telah tercapai dengan baik.

Perataan

Dalam pandangan Dunn, kebijakan yang berorientasi pada perataan bertujuan untuk memastikan bahwa akibat dan usaha dari kebijakan tersebut didistribusikan secara adil di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek distribusi yang adil dari manfaat yang diperoleh atau akibat yang ditanggung oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Suatu kebijakan dianggap berorientasi pada perataan jika akibat atau manfaat yang dihasilkan, misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter, serta usaha atau biaya yang dikeluarkan, didistribusikan secara adil di antara kelompok-kelompok tersebut. Tujuan dari perataan adalah mencapai keadilan atau kewajaran dalam distribusi sumber daya, manfaat, atau beban dari suatu kebijakan.

Dalam evaluasi kebijakan, perataan menjadi salah satu kriteria yang diperhatikan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memperhatikan keadilan atau kewajaran dalam distribusi akibat dan usaha. Jika kebijakan mampu menghasilkan distribusi yang adil dan merata, maka kebijakan tersebut dianggap memenuhi kriteria perataan. Perhatian terhadap perataan dalam evaluasi kebijakan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mempertimbangkan keadilan atau kewajaran dalam distribusi manfaat dan beban di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam kriteria perataan ini, indikator yang digunakan adalah tingkat kesamaan siswa dalam memperoleh fasilitas dan menikmati sarana prasarana di sekolah secara adil tanpa adanya perbedaan ras, suku, agama, budaya, maupun tingkat perekonomian. SDN Lidah Kulon I Surabaya tidak membedakan siswanya dan guru juga memperlakukan setiap siswa dengan adil. Semua siswa dapat menggunakan fasilitas yang disediakan di sekolah, semua siswa juga dapat mengikuti berbagai kegiatan sesuai bakat dan minat mereka melalui berbagai ekstrakurikuler dan perlombaan. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dengan fasilitas yang disediakan sekolah melalui dana BOS. Dengan demikian, kriteria perataan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya ini sudah tercapai dengan baik.

Responsivitas

William N. Dunn menjelaskan bahwa responsivitas menekankan sejauh mana suatu kebijakan dapat merespons kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini penting karena sebuah kebijakan yang efektif, efisien, dan mencukupi dapat tetap dianggap gagal jika tidak mampu memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Dalam evaluasi kebijakan, responsivitas menjadi kriteria penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan alternatif mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Pemangku kepentingan akan menilai sejauh mana kebijakan tersebut merespons secara memadai terhadap kebutuhan dan harapan kelompok yang terlibat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mempertimbangkan preferensi dan nilai-nilai yang relevan.

Menyikapi kebutuhan guru untuk mengelola anggaran dana BOS maka yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi melalui canal YouTube terkait penerimaan dan penggunaan dana BOS. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan rapat kepada guru-guru agar semuanya paham dengan pengelolaan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melakukan revisi anggaran melalui aplikasi RKAS yang biasa disebut ARKAS sebanyak lima kali dalam setahun. Dengan demikian, kriteria responsivitas dalam kebijakan dana BOS di SDN Lidah Kulon I Surabaya telah tercapai dengan baik karena dengan adanya respon tersebut tidak terjadi adanya kesalahan pemahaman antar masing-masing PTK.

Ketepatan

William N. Dunn mengemukakan bahwa kelayakan atau appropriateness terkait dengan pertimbangan substansial dari tujuan kebijakan. Dalam konteks ini, kelayakan menyoroti apakah alternatif kebijakan yang diusulkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian kelayakan melibatkan evaluasi substansi tujuan program dan asumsi yang mendasarinya. Dalam memilih alternatif kebijakan, kelayakan menjadi kriteria penting untuk memastikan bahwa alternatif tersebut tidak hanya efektif, efisien, dan memadai, tetapi juga secara substansial sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelayakan melibatkan pertimbangan nilai atau manfaat dari tujuan program dan kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Untuk melihat apakah alternatif kebijakan yang diusulkan ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka segala bentuk anggaran kegiatan dari dana BOS ini dilaporkan secara online melalui aplikasi ARKAS. Kemudian, dilaksanakan juga diawasi oleh pengawas sekolah dan Dinas Kota Surabaya agar anggaran BOS ini tepat sasaran dan tidak terjadi kecurangan. Semua pembelanjaan kebutuhan sekolah juga dilakukan melalui aplikasi SipLah sehingga semua anggaran yang dikeluarkan tepat dan transparan karena dapat dilacak oleh Kemendikbud sehingga tidak akan dimanipulasi.

SIMPULAN

Pegelolaan dana BOS di SDN Lidah Kulon I/464 Surabaya telah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang mana sekolah memenuhi kriteria efektivitas dengan mencapai tujuan dana BOS yakni siswa bebas dari pungutan biaya sekolah. Kemudian pada kriteria efisiensi dilaksanakan dengan melakukan pembelanjaan kebutuhan sekolah sesuai dengan Standar Harga Pembelian (SSH) yang tertera di petunjuk teknis yang mana kebutuhan sekolah dibeli dengan harga terendah. Selanjutnya, kecukupan di SDN Lidah Kulon I Surabaya terealisasi dengan cara menggunakan seluruh anggaran dana BOS untuk kebutuhan siswa dari segi sarana prasarana hingga kegiatan akademik maupun non akademik siswa yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pada kriteria perataan, sekolah memberikan kesempatan seluruh siswa untuk menikmati fasilitas dan sarana prasarana sekolah secara adil tanpa adanya perbedaan. Selanjutnya, kriteria responsivitas direalisasikan dengan memberikan sosialisasi pada PTK dan kesempatan revisi RKAS sebanyak lima kali dalam setahun. Dan yang terakhir, adanya pelaporan secara online melalui ARKAS, adanya pengawasan dari pengawas sekolah dan Dinas Kota Surabaya, serta pembelanjaan melalui aplikasi SipLah dapat memenuhi kriteria ketepatan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung baik secara materiil maupun non-materiil, kepada dosen Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, serta Spotify yang menyediakan berbagai musik yang indah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan artikel ini secara efektif dan efisien.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 47–64.
- Akibu, R. S. (2014). Evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sma negeri 1 ampibabo kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong. *Katalogis*, 2(1).
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112–122.
- Jones. (1985). *School Finance: Technique and Social Policy*. London Coller Macmillan Pub.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rina, H., Setiawati, B., & Subadi, W. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 1(1), 153–171.

- Setiawan, N. P., Hernawan, D., & Salbiah, E. (2017). Evaluasi kebijakan peraturan daerah kota Bogor no 12 tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok (studi kasus pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada sekolah menengah atas negeri di kota Bogor). *Jurnal Governansi*, 3(1), 13–22.
- Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *Katalogis*, 5(1).
- Stufflebeam. (1985). *Systematic Evaluation*. Kluwer Nijhof Publishing.
- William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.